



**Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik**

***Financial Management of Demokrasi Indonesia Perjuangan Party in Jepara
Regency as Effort Increase Public Trust***

Farich Azhar¹⁾, Kushandajani²⁾

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: ... ; Disetujui: ; Dipublish:

Abstrak

Pengelolaan dana dalam internal partai sangat menentukan eksistensi dan elektabilitas partai dalam perpolitikan. Demi meningkatkan elektabilitas partai serta untuk menjaga kepercayaan anggota partai maupun kepercayaan publik, maka transparansi keuangan partai sangat diperlukan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik masih jauh dari harapan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga demokrasi dan pemerintahan. Pengelolaan dana dalam internal partai sangat menentukan eksistensi dan elektabilitas partai dalam perpolitikan. DPC PDIP Perjuangan dalam rekapitulasi KPUD Kabupaten Jepara pada pemilukada tahun 2014 memperoleh suara terbanyak kedua, namun dalam transparansi keuangan sangat tertutup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan keuangan PDIP Perjuangan Kabupaten Jepara terhadap elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara. Metodologi yang digunakan kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sampel sebanyak 100 orang total penduduk Kabupaten Jepara yang sudah memiliki hak pilih yang diambil dengan teknik probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan, DPC PDIP Kabupaten Jepara dikelola dengan disiplin dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut membuat kepercayaan publik meningkat, dan PDIP dinilai memiliki pengetahuan dalam pelaporan keuangan yang baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Partai Politik, Kepercayaan Publik

Abstract

Fund management in the party internal determines the existence and electability of the party in politics. To increase party electability and to maintain the confidence of party members and public trust, party financial transparency is very much needed.

Transparency in political party financial management is still far from expectations because as a public institution political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Fund management in the party internal determines the existence and electability of the party in politics. DPC PDIP Perjuangan in the recapitulation of the Jepara District Election Commission in the 2014 post-conflict local election gained the second most votes, but in financial transparency, it was very closed. The purpose of this study was to determine the financial management of PDIP Perjuangan in Jepara Regency on the electability of the Demokrasi Indonesia Perjuangan Party (PDIP) in Jepara Regency. The methodology used is descriptive quantitative to explain a phenomenon or social reality. Samples of 100 people in a total population of Jepara Regency who already have the right to vote were taken using probability sampling techniques. The results showed the financial statements, DPC PDIP Jepara Regency managed with discipline and in accordance with applicable laws, it made public confidence increase, and PDIP considered to know about good financial reporting.

Keywords : Financial Management, Political Party, Public Trust

*Corresponding author:
E-mail: farich_azhar92@yahoo.com

ISSN 2549-1660 (Print)
ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Partai politik didesain untuk mempengaruhi karakter kebijakan publik ke dalam kepentingan ideologis tertentu, melalui praktek kekuasaan secara langsung maupun melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan elektoral. Partai politik mempunyai fungsi dan tugas serta kewenangan atau hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur tertentu sehingga memiliki tujuan untuk mencapai tujuan sistem politik yang dinamis dan harmonis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Permasalahan yang menarik untuk di bahas terkait dengan permasalahan pengelolaan keuangan partai politik yang sampai saat ini masih belum optimal untuk dilaksanakan. Kegiatan pendanaan partai politik pada umumnya dilaksanakan melalui iuran anggota. Akan tetapi dalam perkembangannya kebutuhan dana dari partai politik untuk kegiatan kampanye nampaknya semakin besar.

Kasus korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh para elit partai politik menjadi salah satu dampak yang di sebabkan biaya politik yang tinggi sehingga mendorong para politisi mencari sumber permodalan yang besar. Berdasarkan kasus dilapangan para elit politik yang dihimpit kebutuhan akan biaya politik yang tinggi, mereka mencari

permodalan yang sebesar-besarnya baik yang berstatus incumben maupun elit politik baru. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan keuangan partai politik dimana partai politik mendapatkan hak keuangan yang sah akan tetapi aktifitas-aktifitas para elit politik menunjukkan bahwa perlu perhatian yang lebih komprehensif untuk melihat rumah tangga partai politik dalam mengelola keuangan.

Demi meningkatkan elektabilitas partai serta untuk menjaga kepercayaan anggota partai maupun kepercayaan publik, maka transparansi keuangan partai sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah merumuskan undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan partai politik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Naumun, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 5,29 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 69 kasus dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 560 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 7,3 Triliyun uang negara, dimana data tersebut didominasi oleh para elit politik (Khairudin & Erlanda, 2016). Selain itu ketegasan pemerintah perlu dipertanyakan, karena tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak menyusun laporan keuangan. Adapun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 justru memberikan kelonggaran pengawasan terhadap keuangan partai politik yaitu, menaikkan jumlah nominal sumbangan baik perorangan maupun badan usaha, namun mekanisme penyampaian laporan keuangan tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut (Permadi & Budi Riharjo, 2015).

Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Sehingga diperlukan pengaturan keuangan partai politik ke depannya sehingga dapat mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Harapan publik untuk dapat

mengakses dokumen laporan keuangan masih sangat sulit dijamin. Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik masih jauh dari harapan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga demokrasi dan pemerintahan. Pengelolaan dana dalam internal partai sangat menentukan eksistensi dan elektabilitas partai dalam perpolitikan. Pada konstelasi pemilu di daerah khususnya di Kabupaten Jepara, PDIP memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 113.768 suara sah berdasarkan rekapitulasi KPUD Kabupaten Jepara pada tahun 2014. Sedangkan suara terbanyak pertama di Kabupaten Jepara adalah PPP dengan perolehan suara 120.990 suara dan disusul partai-partai lain. Dengan melihat rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa selisih suara antara PPP sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Jepara tidak terpaut jauh dengan PDIP. Sehingga PDIP tergolong partai besar di Kabupaten Jepara. Sebagai partai besar, perlu dilihat terkait dalam pengelolaan keuangan partai dan pengaruhnya terhadap perolehan suara di pemilu 2014 kemarin.

Selain predikat PDIP sebagai partai besar di Kabupaten Jepara, PDIP masuk dalam jajaran partai yang terkorup versi KPK selama rentan waktu 2002-2014. Sebagai partai yang masuk dalam 3 besar

partai dengan perolehan suara terbanyak sangat berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan predikat partai terkorup tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol yang tertutup nampaknya tidak mempengaruhi sebuah partai untuk memenangkan dalam pemilu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Indeks Partai Korupsi Periode 2002-2014.



Sumber (ICW, 2014)

Melihat gambar, penjelasan dan ilustrasi data diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai korelasi antara transparansi keuangan partai politik dengan tingkat kepercayaan publik. Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang transparansi keuangan partai politik akan tetapi memiliki fokus yang berbeda-beda seperti, Penelitian dari Sekar Anggun Gading Pinilih yang berjudul “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik” (Pinilih, 2017). Bagus Permadi dan Ikhsan Budi Riharjo yang berjudul

“Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik” (Permadi & Riharjo, 2015). Eka Adhi Wibowo yang berjudul “Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik : Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi DIY Tahun 2014” (Wibowo, 2018). Mayki Ayu Juliastari yang berjudul “Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance : Studi Pada Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gowa” (Lestari, 2018). Alfian Ibnu Sina yang berjudul “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi : Studi Pada DPC PKB di Ngawi” (Sina, 2017).

Penelitian ini mengambil titik fokus berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menekankan Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik. Maka Berdasarkan latar belakang masalah dan kondisi yang telah dibahas di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan PDIP Kabupaten Jepara terhadap Kepercayaan Publik”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara tingkat kepercayaan publik dan Dampak pengelolaan keuangan partai politik terhadap elektabilitas Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jepara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami responden atas keberadaan manusia atau masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Tuasikal, 2013). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta.

Objek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kabupaten Jepara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penduduk Kabupaten Jepara yang sudah mempunyai hak pilih yaitu berjumlah 856.538 orang. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan

menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiono, 2007). Pertimbangan penggunaan rumus Slovin dalam penelitian ini karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/ jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran katelitian
Jumlah populasi dalam penelitian

ini adalah 856.538 orang, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui jumlah sampel penelitian dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{856,538}{1+856,538(0,1)^2}$$

$$n = \frac{856,538}{8,566}$$

$$n = 99,9 \text{ disesuaikan oleh responden menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang menjadi responden

dalam penelitian ini adalah disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang total penduduk Kabupaten Jepara yang sudah memiliki hak pilih. Sampel yang diambil berdasarkan teknik probability sampling; simple random sampling, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental. Sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, dan apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui sesuai dengan kriteria atau dapat digunakan sebagai responden (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini, data-data yang terkumpul lalu dianalisa melalui analisis data deskriptif kuantitatif yang terdiri dari dua alur kegiatan yaitu, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

a. Penyajian Data

Penyajian dapat diartikan sebagai sekumpulan data angka dan tabel tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk tabel angka yang dilengkapi dengan matriks, bagan, grafik dan jaringan. Penyajian data juga termasuk dari bagian menganalisis.

b. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan diawal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi secara utuh. Kesimpulan akhir juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan validasinya. Jika tidak demikian maka yang dimiliki adalah menarik kesimpulan tentang suatu hal yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bagian meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Data dilapangan menunjukkan pada karakter responden tingkat jenis kelami, perempuan lebih banyak dari segi jumlah atau kuantitas dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan berjumlah 64 dari 100 responden yang diteliti atau 64 %, sedangkan laki-laki sebanyak 36 dari 100 responden yang diteliti atau 36% dari total responden. Kategori umur, responden didominasi oleh masyarakat yang mempunyai usia 41-50 tahun sebanyak 47 atau 47% dari 100 responden yang diteliti. Sedangkan masyarakat yang memiliki usia 30-40 tahun sebanyak 30 responden atau 30% dari total responden yang diwawancarai. Sedangkan responden yang berusia kurang dari 30 tahun hanya sebanyak 13% dari 100 responden yang diteliti. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, SMA yaitu sebanyak 52 responden atau 52% dari 100 responden yang diteliti, Sarjana hanya 34 dari 100 responden atau 34% dari total responden yang diteliti. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pekerjaan didapat, wiraswasta sebanyak 49 responden atau 49% dari 100

responden yang diteliti. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian adalah 17%, dan yang berprofesi sebagai PNS adalah 24%.

b. Pengelolaan Keuangan Partai Politik Variabel Laporan Keuangan

Hasil responden dalam melihat pendapat tentang kewajiban partai politik membuat laporan tahunan menunjukkan 39 % sangat setuju, 31% setuju, 22 % tidak setuju, dan 8 % sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, masyarakat berpendapat bahwa partai politik seperti DPC PDIP Kabupaten Jepara selalu menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban partai kepada publik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden 70% mengetahui hal tersebut dan 30% tidak setuju partai membuat laporan keuangan. Sementara itu, Pendapat responden tentang transparansi dan akuntabilitas laporan arus kas partai politik didapat, 33 % sangat setuju, 37 % setuju, 23 % tidak setuju dan 7 % sangat tidak setuju. Artinya masyarakat ternyata mempercayai bahwa DPC PDIP Kabupaten Jepara dinilai transparan dalam melakukan laporan arus kas, hal itu terlihat dari 70% responden yang berpendapat partai harus transparan dan akuntabilitas soal laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan yang disampaikan tertutup untuk publik

dan hanya disampaikan kepada pengurus DPC. Masyarakat berpedoman selama ini setiap lembaga yang mendapatkan pendanaan bersumber dari negara atau pemerintah, maka lembaga tersebut wajib untuk menyusun laporan penggunaan dana tersebut tidak terkecuali partai politik. selain laporan arus kas, penyusunan laporan keuangan partai politik harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pendapat responden tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku didapat 32 % sangat setuju, 47 % setuju, 13 % tidak setuju dan 8 % sangat tidak setuju. Masyarakat berpendapat bahwa partai harus membuat laporan berdasarkan standar yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan, hal itu terlihat dari 79% responden yang setuju kesesuaian tersebut.

Variabel Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap (partai PDIP) dilihat dalam dua dimensi kemampuan dan integritas untuk melihat pendapat publik tentang mengelolah keuangan partai. Dimensi kemampuan memperlihatkan pendapat responden, pertama tentang kecukupan kompetensi parpol yang dimiliki dalam mengelola keuangan Partai, 19 % sangat setuju, 47 % setuju, 20 % tidak setuju, dan 14 % sangat tidak setuju.

Sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa DPC PDIP Kabupaten Jepara memiliki kecukupan dalam mengelola keuangan partai. Hal ini dibuktikan 66% responden menyetujui hal tersebut. Masyarakat menilai kepercayaan tersebut berdasarkan pengalaman mereka ketika melakukan interaksi dengan kader atau partai PDIP di Kabupaten Jepara. Sementara itu, Pendapat responden tentang kecukupan pengalaman parpol dalam pengelolaan keuangan partai didapat, 8 % sangat setuju, 59 % setuju, 22 % tidak setuju, dan 11 % sangat tidak setuju. Artinya masyarakat menilai DPC PDIP Kabupaten Jepara memiliki kecukupan pengalaman dalam pengelolaan keuangan partai politik dilihat dari 67% responden yang setuju dan hanya 33% yang tidak setuju. Data tersebut mempertegas masyarakat percaya kepada partai khususnya PDIP Kabupaten Jepara dalam mengelola keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pendapat responden tentang pengelolaan keuangan partai yang melalui mekanisme yang sah dan legal didapat 24% Sangat setuju, 40% setuju, 24% tidak setuju dan 12% sangat tidak setuju. Artinya 64% responden percaya laporan keuangan PDIP dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku. Hal tersebut tidak terlepas dari pengetahuan anggota partai dalam mekanisme pelaporan keuangan yang dinilai masyarakat berkompeten dan

tepat. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat responden tentang pengetahuan yang dimiliki partai politik dalam mengelola laporan keuangan partai didapat 17% sangat setuju, 42% setuju, 32% tidak setuju dan 9% sangat tidak setuju. Sebagai partai besar, masyarakat menilai pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman dan pembelajaran, sehingga responden menganggap pengetahuan tentang laporan keuangan partai PDIP Perjuangan Kabupaten Jepara sangat baik.

Dimensi integritas dalam mempertanyakan tentang laporan keuangan partai. Responden berpendapat tentang laporan keuangan partai yang wajar tanpa manipulasi, didapati 18% sangat setuju, 51% setuju, 22% tidak setuju, 9% sangat tidak setuju. Data tersebut menunjukkan sebagian besar responden mempunyai persepsi bahwa laporan pengelolaan keuangan yang disusun oleh DPC PDIP Kabupaten Jepara tidak mengalami manipulasi dalam penyusunannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara melihat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan partai, responden menilai 15% sangat setuju, 53% setuju, 20% tidak setuju, dan 12% sangat tidak setuju. Artinya DPC PDIP Kabupaten Jepara telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan

keterbukaan informasi dan transparansi dalam laporan keuangan. Tingginya kepercayaan publik terhadap indikator keterbukaan informasi, sejalan dengan Pendapat responden tentang laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya. Hal itu dapat dilihat dari responden 20% sangat setuju, 46% setuju, 24% tidak setuju, 10% sangat tidak setuju. Artinya masyarakat tidak meragukan kemapun DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Jepara dalam laporan keuangan. Masyarakat menilai laporan keuangan partai politik disusun dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan 62% menyetujui hal tersebut dan 38% tidak setuju. Artinya partai politik harus mengedepankan kejujuran dalam setiap laporan. Dalam hal ini, DPC PDIP Perjuangan membuktikan bahawa laporan keuangan yang dilaporkan sangat akuntabel dan bertanggungjawab.

Secara umum, kepercayaan responden terhadap pengelolaan keuangan partai politik 61% percaya dan 39% tidak percaya. DPC partai PDIP perjuangan Kabupaten Jepara dinilai oleh masyarakat laporan keuangan sangat baik, hal itu didukung dengan penerimaan publik laporan pengelolaan keuangan partai tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik 71% setuju dan 29% tidak setuju.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan partai politik merupakan sebuah hal yang memang sudah tidak bisa dihindari sebagai salah satu kewajiban. Laporan pengelolaan keuangan menjadi amanat dari undang-undang yang memang sudah harus segera dilaksanakan sebagai bentuk rutinitas setiap tahun anggaran. laporan keuangan, DPC PDIP Kabupaten Jepara sudah melakukan pelaporan pengelolaan keuangan dengan disiplin dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan UU no 2 dan UU. No. 3 tahun 1999. Sedangkan standar akuntansi berpedoman pada PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI.

Terkait dengan kepercayaan publik, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa DPC PDIP Kabupaten Jepara memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan serta memiliki pengetahuan tentang pelaporan dan juga memiliki laporan keuangan yang wajar tanpa manipulasi. Pada aspek ini masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa partai politik memiliki keterbukaan informasi kepada public terkait dengan pengelolaan keuangan partai. Selain itu masyarakat juga mempercayai bahwa DPC PDIP Kabupaten

Jepara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelola keuangan partai.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Ibu Dr. Kushandajani M.A

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, V. (2011). *Anomali keuangan partai politik: Pengaturan dan praktek*. Jakarta: Kemitraan.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Permadi, B., & Budi Riharjo, I. (2015). *Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik*. Jurna Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 4(Nomor 7).
- Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Alfabeta: Bandung.
- Eka Adhi Wibowo. 2018. *“Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik : Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu di Propinsi DIY Tahun 2014”*. JRAK, Volume 14, No 1 Pebruari 2018.
- Sekar Anggun Gading Pinilih. 2017. *“Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai”*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29 Nomor 1. Halaman 69-81
- Alfian Ibnu Sina. 2017. *“Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Mencegah Korupsi: Studi Pada DPC PKB Kabupaten Ngawi”*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Neheri Surakarta.

- Mayki Ayu Juliestari. 2018. "*Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance*". Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Khairudin dan Erlanda, R. 2016." *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota se-sumatra)*". Jurnal Akuntansi&Keuangan, Vol. 7, No. 2,137 – 140.
- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202014.pdf>